

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN BONE
(STUDI PADA POLRES BONE)**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
untuk memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan**

**KARMILA
1261041002**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016
PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor : 0662/UN36.6/DL/2016 Tanggal 02 Februari 2016

Untuk membimbing saudara:

Nama : Karmila

Nim : 1261041002

Jurusan : PPKn/S1

Fakultas : Ilmu Sosial

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa, diteliti dan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada hari Jumat 03 Juni 2016 dan dinyatakan lulus.

Makassar, 11 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Lukman Ilham, S.Pd., M.Pd
NIP: 19710703 20071 1 001

Firman Muin, SH., M.Pd
NIP: 19561024 198601 1 001

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 2502/UN36.6/KM/2016 Tanggal 26 Mei 2016. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Ujian :

1. Ketua : Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum (.....)
2. Sekretaris : Dr. Mustari, M.Hum (.....)
3. Pembimbing I : Lukman Ilham, S.Pd., M.Pd (.....)
4. Pembimbing II : Firman Muin, SH., M.Pd (.....)
5. Penguji I : Prof. Dr. H. Heri Tahir, SH., MH (.....)
6. Penguji II : Dr. Muhammad Akbal, M.Hum (.....)

SURAT PERNYATA EASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Karmila

Nim : 1261041002

Tempat/Tanggal Lahir: Ajjalireng/13 Juli 1993

Jenis kelamin : Perempuan

Jurusan : PPKn/S1

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian
Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres
Bone)

Dengan dosen pembimbing masing-masing:

1. Lukman Ilham, S.Pd., M.Pd

2. Firman Muin, SH., M.Pd

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.

Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut di dalam/ luar pengadilan dan menanggung segala resiko yang diakibatkannya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Makassar, 11 Juni 2016

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan PPKn

Yang Membuat Pernyataan

Dr. Mustari, M.Hum
NIP. 19651231 199003 1015

Karmila
NIM. 1261041002

MOTO

Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah

*Kecuali, ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain
atas kekeliruan diri sendiri*

(Karmila)

*Kupersembahkan skripsi ini,
sebagai tanda sujud dan baktiku kepada kedua orangtuaku tercinta
atas tetes keringat, air mata dalam setiap sujudnya demi menjadikanku manusia seutuhnya.*

*Penghargaan dan ungkapan sayangku untuk saudara,
keluarga, sahabatku yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepadaku
dengan segenap harapan terbaik dan doa restu serta kebanggaan mereka untukku*

ABSTRAK

Karmila. 2016. Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganagaraan Dibimbing oleh Lukman IlhamSelaku Pembimbing I dan Fiman MuinSelaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, dan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran *Tuhan Yang Maha Esa*, atas segala rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk dan kemudahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi pada Polres Bone)” dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari begitu banyak kesulitan, baik dalam proses pengumpulan bahan pustaka maupun dalam penyusunannya. Namun, karena begitu banyak doa, motivasi, dukungan dan perhatian yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini berlangsung, sehingga segala hambatan yang ada dapat dihadapi dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr.H. Husain Syam, M.TP, Rektor Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan peluang untuk mengikuti proses perkuliahan pada Jurusan PPKn.
2. Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar beserta staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar atas semua bantuannya selama penulis menempuh studi di Universitas Negeri Makassar.

3. Dr. Mustari, M.Hum Ketua Jurusan PPKn dan Lukman Ilham, S. Pd, M.Pd sekretaris Jurusan PPKn atas pelayanan yang diberikan selama ini.
4. Lukman Ilham, S.Pd., M.Pd dan Firman Muin, SH., M.Pd pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikiran serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan baik, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Heri Tahir, SH., MH dan Dr. Muhammad Akbal, M.Hum penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberi masukan, koreksi serta arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas IlmuSosial beserta Staf Pegawai yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas IlmuSosial untuk menorehkan tinta emas di almamater orange yang tercinta.
7. AKBP Yuliar Kus Nugroho, S.I.K., M.H Kepala Kepolisian Resosrt Bone yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi.
8. AKP Andi Asdar, A.Md Kepala Satuan Reskrim Polres Bone dan Ipda Samsul Rijal Kepala Unit Resum Polres Bone yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis.
9. Penghargaan yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Baharuddindan Ibunda Darmawati yang selalu

memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dorongan moril dan materil, serta doa yang tidak pernah putus pada setiap hembus nafasnya sehingga penulis bisa sampai pada titik kebahagiaan yang tidak ternilai ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku: Kardina, yang telah membantu serta selalu memberikan dukungan. Kepada Auliyah Suci Sakira dan Aisyathul Azzahra Nur yang selalu membuatku semangat ketika mengingat keceriaannya. Begitupun kepada seluruh keluarga besar yang memberikan dorongan untuk selalu berjuang dan tidak pantang menyerah dalam hidup.

10. Untuk teman-teman Kost ku tercinta A. Hasni, Ika, Noenu, Kak Yaya, Kak Ayu, Kak Imma, Kak Ifha, Anti terimakasih atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis.
11. Kepada seluruh rekan mahasiswa Jurusan PPKn angkatan 2012 khususnya kelas A, kelas yang telah menyatukan dan memberikan kesempatan untuk bersama selama kurang lebih empat tahun untuk saling mengenal dan berbagi satu sama lain.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebut namanya, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kerjasamanya dapat menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini tidaklah berarti bahwa skripsi yang tersusun ini sudah dalam bentuk yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Yang MahaSempurna. Oleh karena itu, saran dan kritikan sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Makassar, 11 Juni2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
Motto dan Persembahan.....	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar isi.....	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konsep.....	8
A. Tinjauan Mengenai Kriminologi.....	8
B. Kerangka Konsep.....	34
BAB III Metode Penelitian	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35

B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Prosedur Pengumpulan data	37
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	38
H. Analisa Data	38
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	39
A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan	48
BAB V Penutup	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi	65
C. Saran	66
Daftar Pustaka	67

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Data Satuan/ Personil Polres Bone.....	45
Tabel 4.2	Jumlah Laporan/Kasus Yang Masuk di Polres Bone.....	46
Tabel 4.3	Data Penyelesaian Kasus Perjudian Sabung Ayam Tahun 2012 Sampai 2016.....	48
Tabel 4.4	Data Pelaku Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Bone Menurut Pekerjaan, Tahun 2012 sampai Tahun 2016.....	48
Tabel 4.5	Data Pelaku Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polres Bone Menurut Pendidikan, Tahun 2012 sampai Tahun 2016.....	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.1	Skema Kerangka Konsep.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Usulan Judul Skripsi
2. Surat Rekomendasi Tim Pengarah Gagasan Awal Penulisan Skripsi
3. Surat Persetujuan Judul Dan Calon Pembimbing
4. Surat permohonan izin melaksanakan pra penelitian
5. Surat Persetujuan Ujian Proposal
6. Surat Tanda Terima Naskah Dan Persetujuan Seminar Proposal
7. Surat Undangan Seminar Proposal
8. Surat Pengesahan Jilid Proposal Dan Melaksanakan Penelitian
9. Surat Pengesahan Judul Skripsi Dan Pembimbing
10. Surat Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian
11. Surat Permintaan Izin Penelitian Dari BKPMK Kota Makassar
12. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
13. Surat Permohonan Seminar Hasil Penelitian
14. Sistematika Hasil Penelitian
15. Surat Tanda Terima Naskah Dan Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
16. Surat Undangan Hasil Penelitian
17. Surat Persetujuan Pembimbing
18. Surat Undangan Ujian Skripsi
19. Surat SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial
20. Dokumentasi Penelitian
21. Riwayat Hidup Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Karmila

Nim : 1261041002

Tempat/Tanggal Lahir: Ajjalireng/13 Juli 1993

Jenis kelamin : Perempuan

Jurusan : PPKn/S1

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian
Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres
Bone)

Dengan dosen pembimbing masing-masing:

1. **Lukman Ilham, S.Pd., M.Pd**

2. **Firman Muin, SH., M.Pd**

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.

Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut di dalam/ luar pengadilan dan menanggung segala resiko yang diakibatkannya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Makassar, 11 Juni 2016

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan PPKn

Yang Membuat Pernyataan


Dr. Mustari, M.Hum
NIP. 19651231 199003 1015


Karmila
NIM. 1261041002

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 2502/UN36.6/KM/2016 Tanggal 26 Mei 2016. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Ujian :

1. Ketua : Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum (.....)
2. Sekretaris : Dr. Mustari, M.Hum (.....)
3. Pembimbing I : Lukman Ilham, S.Pd., M.Pd (.....)
4. Pembimbing II : Firman Muin, SH., M.Pd (.....)
5. Penguji I : Prof. Dr. H. Heri Tahir, SH., MH (.....)
6. Penguji II : Dr. Muhammad Akbal, M.Hum (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor : 0662/UN36.6/DL/2016 Tanggal 02 Februari 2016

Untuk membimbing saudara:

Nama : Karmila

Nim : 1261041002

Jurusan : PPKn/S1

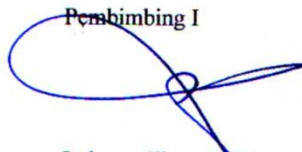
Fakultas : Ilmu Sosial

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa, diteliti dan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada hari Jumat 03 Juni 2016 dan dinyatakan lulus.

Makassar, 11 Juni 2016

Pembimbing I



Lukman Ilham, S.Pd., M.Pd
NIP: 19710703 20071 1 001

Pembimbing II



Firman Muin, SH., M.Pd
NIP: 19561024 198601 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani

kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman baik riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Perjudian ini tentu saja menguras keuangan masyarakat yang tidak sedikit. Sedangkan disisi lain, ada kesan aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa tempat

perjudian disinyalir mempunyai *backing* dari oknum aparat keamanan itu sendiri.

Ditinjau dari kepentingan nasional, segala jenis dan bentuk perjudian mempunyai efek yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya judi bola, pacuan kuda, pertandingan tinju, judi kupon putih. Dalam praktek perjudian tersebut, bahkan memakai teknologi canggih melalui telepon, internet, SMS (*Short Message Service*). Selain pemabukan, pelacuran, dan pengemisan, perjudian pun sudah digolongkan sebagai satu penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi dan tidak melakukan perjudian.

Dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum. Dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif dari perbuatan mereka dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian tetapi bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak

mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi sabung ayam. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana sipemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya di Bone adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain.

Dampak dari perjudian sabung ayam itu sangatlah merugikan sekali bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dan begitu pula dengan perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian

yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Perjudian sabung ayam atau yang dikenal dengan *massaung manuk* (Bone), selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP. Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan Negara semakin terpuruk.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka

tahu risikonya, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN BONE (STUDI PADA POLRES BONE)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone?
2. Bagaimakah upaya-upaya penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam upaya menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Tinjauan Mengenai Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi atau ilmu tentang kejahatan termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan Hukum Pidana atau ilmu tentang hukumnya kejahatan yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Namun objek dan tujuan keduanya berbeda. Objek dalam ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau yang berhubungan dengan pidana, dan tujuannya agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Sedangkan yang menjadi objek dalam kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuan dari kriminologi ini adalah untuk mengetahui dan mengerti faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga seseorang melakukan perbuatan jahat, apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat atau lingkungan disekitarnya, baik keadaan sosiologis maupun ekonomisnya.

Jika sebab-sebab dilakukannya perbuatan jahat itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat demikian, atau agar supaya orang-orang lain pun tidak akan melakukannya. Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materiil maupun formal serta sistem penghukuman dianggap sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Bahkan ada beberapa yang berpendapat bahwa jika nanti perkembangan kriminologi sudah sempurna, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pemidanaan. Sebab meskipun telah berabad-abad dijatuhkan pidana kepada orang yang berbuat kejahatan, namun dalam kenyataan yang ada kejahatan masih tetap dilakukan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut P. Topinard seorang Antropolog Prancis mengemukakan bahwa:

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan; maka Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹

Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut :

¹ Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. xvii.

Menurut Bonger Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²

Lebih lanjut Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. *Antropologi Kriminal*; adalah ilmu pengetahuan tentang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. *Sosiologi Kriminal*; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Psikologi Kriminal*; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. *Penologi* adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.³

Di samping itu menurut Bonger terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. *Higiene Kriminal*; usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. *Politik Kriminal*; usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. *Kriminalistik* (police scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan pendidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁴

Sutherland merumuskan Kriminologi sebagai:

² Loc.cit.

³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9-10.

⁴ Yesmil Anwar, op.cit, hlm. 8.

Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).⁵

Lebih lanjut Sutherland membagi kriminologi dalam tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum; kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi hukum; merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sbab musabab dari kejahatan.
3. Penologi; pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun prepentif.⁶

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurut Paul mudigdo Mulyono definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.⁷

Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁸

Sementara itu, Wilpang Savits dan Johnston dalam *The Sosiologi of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai:

⁵ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, op.cit, hlm. 10-11.

⁶ Ibid, hlm. 11.

⁷ Ibid, hlm. 11.

⁸ Ibid, hlm. 12.

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁹

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki, mempelajari dan menganalisa. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari sebab musabab dari kejahatan tersebut (*Etiologi*). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

2. Obyek Studi kriminologi

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa:

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁰

Lanjut menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi

Kriminologi meliputi :

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan

⁹ Yesmil Anwar, Adang, 2010, Op.cit, hlm. xviii.

¹⁰ Topo Santoso, 2003, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya¹¹

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut :

a. Perbuatan yang disebut kejahatan

1) Kejahatan dari segi Yuridis

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Menurut Bonger menyatakan bahwa:

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.¹²

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa:

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹³

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagian perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

2) Kejahatan dari segi Sosiologis

¹¹ Ibid, hlm. 12.

¹² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Op.cit, hlm. 14.

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78.

Menurut Topo Santoso:

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.¹⁴

Thorsten Sellin mengemukakan bahwa:

Hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif mana pun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum pidana.¹⁵

Kartini Kartono mengemukakan bahwa:

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁶

b. Pelaku Kejahatan

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

¹⁴ Topo Santoso, Op.cit, hlm. 15.

¹⁵ Yesmil Anwar, Adang, Op.cit, hlm. 178.

¹⁶ Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 144-145.

c. Reaksi Masyarakat yang Ditujukan Baik Terhadap Perbuatan Maupun Terhadap Pelakunya

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang.

Menurut Kartini Kartono bahwa:

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar kalis dari gangguan kejahatan. Jadi, pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respons dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, rumah penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat “ulung” agar rakyat tidak terganggu dan ada tindakan preventif, agar para penjahat tidak bisa merajalela.¹⁷

Kehidupan di dalam penjara itu mempunyai kebudayaan sendiri.

Artinya, di kalangan para narapidana itu ada norma-norma, hukum-hukum, kontrol, dan sanksi-sanksi sosial sendiri.

3. Tinjauan mengenai Kejahatan

a. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah:

Perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.¹⁸

Menurut Aturan Yuridis Formal

¹⁷ Ibid, hlm. 195.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, hlm. 125.

Dengan mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta perilakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka atau barang siapa yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau barang siapa dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP). Kemudian masyarakat tepatnya orang awam akan menunjuk ia atau mereka yang dijatuhikeputusan bersalah dan harus dihukum adalah “penjahat” yang melakukan tindak “kejahatan” (dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, tidak dijumpai istilah penjahat) berarti istilah penjahat adalah istilah yang ada secara umum dalam masyarakat. Masyarakat melihat penjara (lembaga pemasyarakatan) adalah tempatnyaorang jahat. Hal demikian membingungkan apabila kemudian mendapat penjelasan dan merasakan kebenaran bahwa tidak semua penjahat berada dalam penjara. Masih banyak yang berkeliaran di luar dinding tembok yang menyeramkan itu, yang telah dihumanisasikan dengan nama lembaga pemasyarakatan.

Menurut Kriminologi

Paul Moedigdo Moeliono pada tahun 1961 dalam majalah Star Weekly memperingatkan agar jangan melebih-lebihkan arti kejahatan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana, justru karena sifat kejahatan yang subyektif dan relatif telah menjadi tugas kriminologi untuk merumuskan suatu perumusan yang tidak apriori, melainkan sehalus mungkin mendapatkan sesuatu yang dapat melengkapi

dan menyempurnakan rumusan pidana yang sangat terbatas itu. Memang suatu beban bagi kriminologi untuk merumuskan apa sebenarnya “kejahatan” dan “penjahat”. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, meimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan.¹⁹

Dalam Kriminologi dikenal rumusan-rumusan kejahatan yang berasal dari beberapa ahli:

Garofalo, merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih.²⁰

Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok di mana pelaku menjadi anggotanya.²¹

Radellife-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran *usage* (tata cara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi.²²

Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).²³

Menurut Sue Titus Reid bagi satu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain:

¹⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

²⁰Ibid, hlm. 79.

²¹Ibid, hlm. 79.

²²Ibid, hlm. 79.

²³Ibid, hlm. 79.

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau *ommissi*. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁴

b. Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan

Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori:

1. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatri) menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motifasi seseorang.
2. Teori Biologis, mengemukakan tentang batasan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah seseorang. Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat, diturunkan oleh keluarga, dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan sipelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu.

²⁴ Ibid, hlm. 79-80.

3. Teori Sosiogenesis, menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri.
4. Teori Subkultur, sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. A. Lacassagne, Bonger, Sutherland, dan Von Mayr, (Mazhab lingkungan), memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:
 - a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
 - b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
 - c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
 - d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.²⁵

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

c. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan

²⁵ Kartini Kartono, 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 25.

dihukum penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Penerapan pembinaan dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang telah diawali sejak pidato Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo yang berjudul Beringin Pengayoman. Upaya mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakikatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif. Secara lebih umum, upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan dengan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Metode pencegahan secara operasional fisik, dilakukan oleh polantas, juga berbagai cara perondaan dengan sistem Wilson dan sebagainya. Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan Walter C. Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.²⁶

Pencegahan kejahatan ialah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.

Peran polisi dalam pencegahan kejahatan;

- 1) Menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan, berupa strategi memanfaatkan analisis statistik kriminal, menggunakan penghalang jalan maupun operasi pengguna jalan.
- 2) Melakukan patroli, yang diartikan sebagai suatu periode gerakan sistematis dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa polisi melintasi daerah tertentu, untuk mencapai tujuan keamanan yang bersifat preventif.
- 3) Mengaktifkan dan membuat program, misalnya sistem keamanan lingkungan, sistem keamanan kawasan perkantoran dan industri maupun proyek vital, sistem keamanan tempat yang banyak

²⁶ Abintoro Prakoso, Op.cit, hlm. 171.

dikunjungi orang, dengan tanpa mengabaikan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan satuan pengamanan (satpam) setempat.

- 4) Mengidentifikasi situasi dan kondisi yang dapat mendorong terjadinya kejahatan, diarahkan pada daerah rawan kejahatan. Dengan mengetahui berbagai faktor tersebut polisi dapat menentukan skala prioritas kelompok sasaran dan tempat sasaran dimana terdapat faktor kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kejahatan.²⁷

4. Tinjauan Mengenai Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Perjudian atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (1989) adalah:

“Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Di bawah ini adalah beberapa definisi judi, atau perjudian :

²⁷ Ibid, hlm. 172-173.

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah :

Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dikatakan main judi yaitu:

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Dali Mutarani, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.²⁸

Pada pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan pada pasal 2 dinyatakan :

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu

²⁸Kartini Kartono, Op.cit, hlm. 58.

bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

3. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Adapun Pasal 303 bis KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang

paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam menanggulangi, memberantas, dan paling tidak mencegah timbulnya perjudian tersebut.

Selanjutnya pengertian permainan judi diperluas lagi dengan Pertaruhan antara dua orang/lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana para petarung (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut. Misalnya: tujuh orang perenang berlomba/ bertanding, untuk memperebutkan juara. Sementara itu orang-orang lain bertaruh mengenai siapa juara, maka orang-orang lain itu, dipandang melakukan permainan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya

menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang.

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

b. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

- 1) Di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck,*

Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Yang berputar (Paseran), *Pachinko*, *Poker*, *Twenty One*, *Hwa-Hwe*, *Kiu-Kiu*.

- 2) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempat uang (*coin*), Koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu kuda, Kerapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba atau kambing, Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Yang dikatakan main judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-

untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”.

c. Pengertian Perjudian Sabung Ayam

Sabung Ayam atau dalam bahasa bali disebut, “*Tajen*”(taji), dan dalam bahasa bugis di disebut, “*Massaung Manu*”(adu ayam), telah berkembang cukup mengakar di dalam kehidupan masyarakat kita.

Judi Sabung ayam merupakan sebuah kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasa dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah di lacak oleh pihak berwajib.

Adu Ayam Jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.. Di Bali permainan sabung ayam disebut Tajen. Tajen berasal-usul dari

tabuh rah, salah satu Butha Yad-nya (upacara) dalam masyarakat Hindu di Bali. Tujuannya mulia, yakni mengharmoniskan hubungan manusia dengan bhuana agung. Dalam kebudayaan Bugis sendiri sabung ayam merupakan kebudayaan telah melekat lama, *Manu*(Bugis) atau *Jangang* (Makassar) yang berarti ayam, merupakan kata yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Gilbert Hamonic menyebutkan bahwa kultur bugis kental dengan mitologi ayam. Hingga Raja Gowa XVI, I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, digelar “*Haaantjes van het Oosten*” yang berarti Ayam Jantan dari Timur .

Dalam kitab La Galigo diceritakan bahwa tokoh utama dalam epik mitik itu, Sawerigading, kesukaannya menyabung ayam. Dahulu, orang tidak disebut pemberani (*to-barani*) jika tidak memiliki kebiasaan minum arak (*angnginung ballo*), judi (*abbotoro*), dan *massaung manu*’ (adu ayam), dan untuk menyatakan keberanian orang itu, biasanya dibandingkan atau diasosiasikan dengan ayam jantan paling berani di kampungnya (di negerinya), seperti *Buleng – bulengna Mangasa*, Korona *Mannongkoki*, *Barumbunna Pa’la’lakkang*, *Buluarana Teko*, *Campagana Ilagaruda* (Galesong), *Bakka Lolona Sawitto*, dan lain sebagainya. Dan hal sangat penting yang belum banyak diungkap dalam buku sejarah adalah fakta bahwa awal konflik dan perang antara dua negara adikuasa, penguasa semenanjung barat dan timur jazirah Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa dan Bone diawali dengan “*Massaung Manu*”. (*Manu Bakkana Bone Vs Jangang Ejana Gowa*). Pada tahun 1562, Raja Gowa X, I Mariogau Daeng

Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (1548 – 1565) mengadakan kunjungan resmi ke Kerajaan Bone dan disambut sebagai tamu negara. Kedatangan tamu negara tersebut dimeriahkan dengan acara “*massaung manu*”. Oleh Raja Gowa, Daeng Bonto mengajak Raja Bone La Tenrirawe Bongkange bertaruh dalam sabung ayam tersebut. Taruhan Raja Gowa 100 katie emas, sedang Raja Bone sendiri mempertaruhkan segenap orang Panyula (satu kampong). Sabung ayam antara dua raja penguasa semenanjung timur dan barat ini bukanlah sabung ayam biasa, melainkan pertandingan kesaktian dan kharisma. Alhasil, Ayam sabungan Gowa yang berwarna merah (*Jangang Ejana* Gowa) mati terbunuh oleh ayam sabungan Bone (*Manu Bakkana* Bone). Kematian ayam sabungan Raja Gowa merupakan fenomena kekalahan kesaktian dan kharisma Raja Gowa oleh Raja Bone, sehingga Raja Gowa Daeng Bonto merasa terpukul dan malu. Tragedi ini dipandang sebagai peristiwa *siri*’ oleh Kerajaan Gowa. Di lain pihak, kemenangan *Manu Bakkana* Bone menempatkan Kerajaan Bone dalam posisi psikologis yang kuat terhadap kerajaan – kerajaan kecil yang terletak di sekitarnya. Dampak positifnya, tidak lama sesudah peristiwa sabung ayam tersebut serta merta kerajaan – kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Bone menyatakan diri bergabung dengan atau tanpa tekanan militer, seperti Ajang Ale, Awo, Teko, serta negeri Tellu Limpoe. Rupanya sabung ayam pada dahulu kala di Nusantara bukan

hanya sebuah permainan rakyat semata tetapi telah menjadi budaya politik yang mempengaruhi perkembangan sebuah dinasti kerajaan.²⁹

d. Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum

Bicara tentang “Judi” termasuk “Sabung Ayam” selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP . Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat

²⁹http://phesolo.wordpress.com/2011/12/02sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar-permainan-semata/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2433095604

menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah. Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur ;

- a) adanya pengharapan untuk menang,
- b) bersifat untung-untungan saja,
- c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan
- d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah :

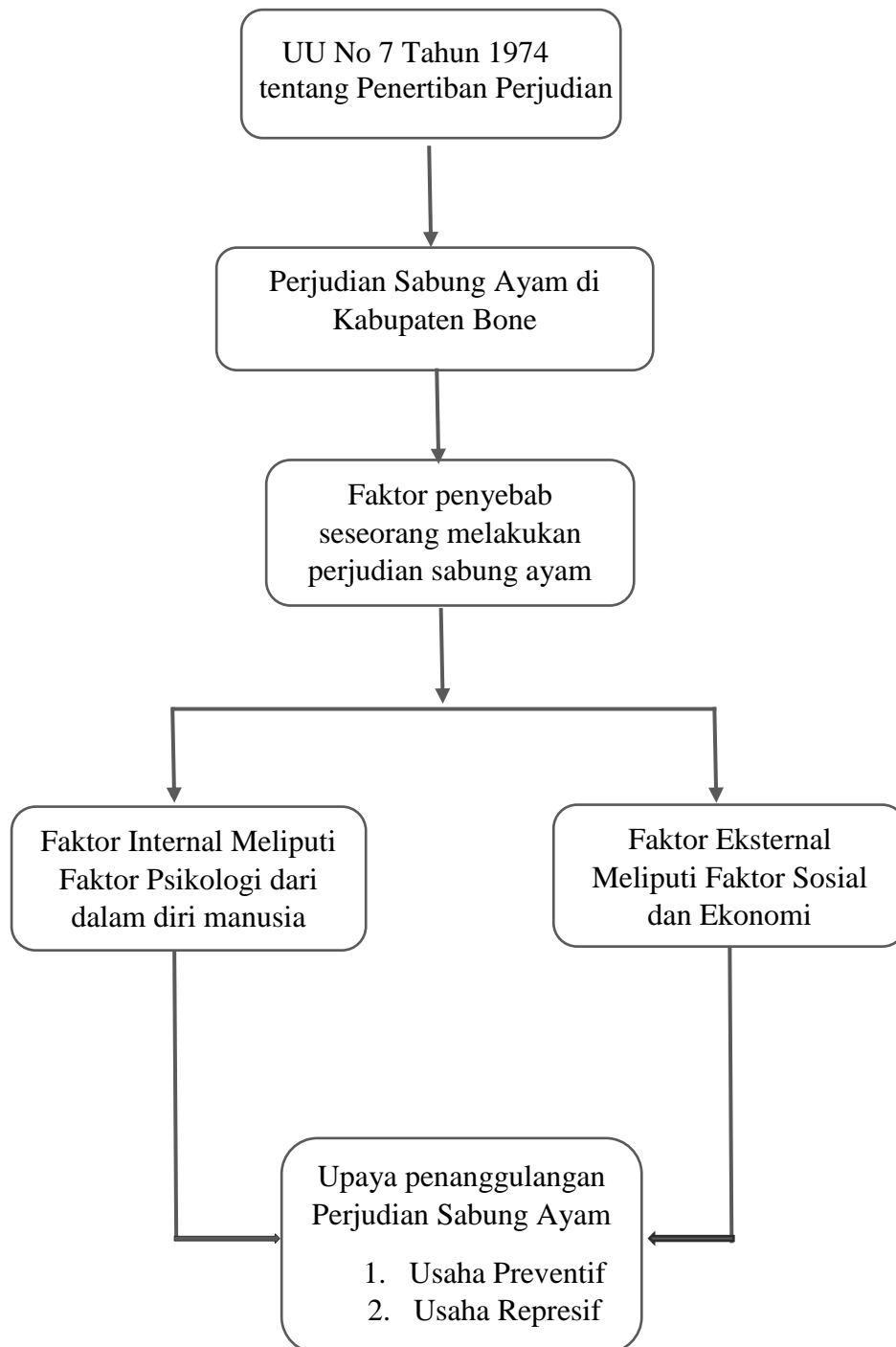
- 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum.
- 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum

yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum.

- 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum.
- 4) orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum. (vide, pasal 303 bis KUHP).

Kalau mengacu pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di “kasino”. di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No.9 tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi. Agaknya pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun 1974 Jo. pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara asas teori hukum, PPRI No.9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.³⁰

³⁰<http://artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan-hukum-tentang-judi/>

B. Kerangka Konsep*Gambar 1.1*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan yang terjadi didalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, tepatnya di Wilayah Hukum Polres Bone.

Penulis memilih lokasi-lokasi tersebut karena tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini. Selain itu tempat tersebut juga mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan.

C. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua tahap penelitian, yaitu:

1. Tahap persiapan penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih

ahli dalam hal ini adalah pembimbing untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti membuat kesepakatan dengan narasumber mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti melakukan analisa data dan interpretasi data sesuai dengan teknik analisa data.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 macam, yaitu :

1. Data primer : yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, serta pendapat para pakar hukum.

E. Instrumen Penelitian

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut :

1. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa pejabat Kepolisian yang terkait langsung dengan perjudian Sabung Ayam.
2. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang terdapat kantor kepolisian terkait dengan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kriteria utama terhadap hasil penelitian adalah valid, reliable dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Hal ini dikarenakan menurut penelitian kualitatif suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada konsisten, dan berulang seperti semula.

H. Analisa Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjeaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah Otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data kabupaten Bone dalam angkatahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk kabupaten Bone tahun 2015 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km².

Polres Bone merupakan Polres jajaran dari POLDA SULSEL yang terletak di Jalan Yos Sudarso No 27 Watampone 92715 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, luas 2444 dan jarak Kota Bone dengan Polres Bone 3 km. Dan dengan jumlah personil 897 pers, jumlah polsek 25, pospol 5, dan dengan batas wilayah :

- Utara : Berbatasan Kab. Wajo dan Kab soppeng
- Selatan : Berbatasan Kab. Sinjai dan Kab Gowa
- Barat : Berbatasan Kab. Maros, Kab Pangkep, dan Kab Barru
- Timur : Berbatasan Teluk Bone

Saat ini Polres Bone dipimpin oleh **AKBP Yuliar Kus Nugroho,**

S.I.K., M.HP Polres Bone membawahi 25 Polsek jajaran diantaranya :

1. Polsek Ajangale
2. Polsek Dua Boccoe
3. Polsek Amali
4. Polsek Tellu Siattinge
5. Polsek Ulaweng
6. Polsek Palakka
7. Polsek Lamuru
8. Polsek Tellu Limpoe
9. Polsek Lapri
10. Polsek Ponre
11. Polsek Libureng
12. Polsek Patimpeng
13. Polsek Bontocani
14. Polsek Kahu
15. Polsek Cenrana
16. Polsek Awangpone
17. Polsek Tanete Riattang
18. Polsek Kp. Bajoe
19. Polsek Barebbo
20. Polsek Sibulue
21. Polsek Cina

- 22. Polsek Mare
- 23. Polsek Tonra
- 24. Polsek Salmekko
- 25. Polsek Kajuara

a) Polres Bone Memiliki Visi Dan Misi Sebagai Berikut :

Visi:

Dengan berpedoman pada profesionalisme jajaran Polres Bone bertekad untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa angkutan umum, pelabuhan serta masyarakat umum dengan tetap berpegang teguh pada budaya lokal dan kepercayaan masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meniadakan semua bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat melalui penegakan hukum dan menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Misi:

Dengan modal kepercayaan masyarakat Polisi bersama masyarakat bertekad untuk meningkatkan mutu pelayanan guna menciptakan rasa aman, nyaman, dan aman melalui Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminalitas.

b) Polres Bone Memiliki Alut/Alsus Yaitu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Tameng Fiber | : 250 buah |
| 2. Tongkat | : 139 buah |
| 3. Helm Dalmas | : 250 buah |
| 4. Pelindung tangan/kaki | : 235 buah |

5. Tabung Damkar	: 17 buah
6. Pengeras Suara	: 5 buah
7. Handycam	: 5 buah
8. Camera Video	: 2 buah
9. Gas Masker	: 20 buah
10. Borgol	: 9 buah
11. Tali Dalmas	: 3 roll
12. Metal Detector	: 3 buah
13. Line Detector	: 2 buah
14. Tenda Kompi	: 3 unit
15. Ht	: 32 unit
16. Radio	: 9 nihil
17. Telephone	: 2 unit
18. Fax	: 1 unit
19. Komp Ruang Itc	: 1 unit
20. Alat Vidcon	: 1 unit

c) Polres Bone Mempunyai Personil Sebanyak 987 Personil Yang Terbagi
Dibeberapa Fungsi Dan Polsek Jajaran

Tabel 4.1
Data Satuan/ Personil Polres Bone

NO	SATUAN	GOLONGAN KEPANGKATAN							JUMLAH		
		PA		BA/TA			PNS		DSP	RIL	(+/ -)
		DSP	RIL	DSP BA/TA	RIL BA	RIL TA	DSP	RIL			
1.	PIMPINAN	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-
2	BAG SUMDA	12	4	12	52	-	5	5	29	61	+32
3	BAG REN	6	1	4	4	-	2	2	12	7	-5
4	BAG OPS	11	3	9	8	-	3	2	23	13	-10
5	SIUM	1	-	6	8	-	4	2	11	10	-1
6	SIKEU	1	1	4	2	-	4	2	9	5	-4
7	SIPROPAM	1	1	14	15	-	-	1	15	17	+2
8	SIWAS	1	1	6	3	-	2	-	9	4	-5
9	SPKT	4	1	9	10	-	-	-	13	11	-2
10	SAT INTELKAM	9	1	40	36	-	2	1	51	38	-13
11	SAT RESKRIM	8	7	52	58	-	6	1	66	66	
12	NARKOBA	5	3	18	16	-	2	1	25	20	-5
13	SAT BINMAS	6	2	13	9	-	2	1	21	12	-9
14	SAT POL. AIR	10	2	21	15	-	3	-	34	17	-17
15	SAT SANHARA	9	3	114	46	-	2	-	125	49	-76
16	SAT LANTAS	7	6	64	101	-	2	5	73	112	+39
17	SAT TAHTI	1	1	7	10	-	-	-	8	11	+3
18	SITIPOL	1	-	7	3	-	-	-	8	3	-5
19	POLSEK / TA	308	55	914	425	-	48	5	1270	485	-785
JUMLAH		403	94	1314	821	-	87	28	1804	943	-861

Sumber: Profil Polres Bones Tahun 2014

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan faktor penyebab kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone. Berdasarkan

dari hasil yang penulis dapat selama melakukan penelitian. Akan tetapi sebelum membahas masalah tersebut terlebih dahulu penulis akan menyajikan data-data kasus kejahatan perjudian sabung ayam yang terajdi wilayah hukum polres Bone.

Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Untuk mengetahui tingkat suatu kejahatan mengalami peningkatan atau penurunan dapat dilihat dari angka-angka statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian.

Berikut ini data yang diperoleh Penulis dari pihak Polres Bone mengenai laporan adanya kasus kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone berjumlah 15 laporan kasus kejahatan perjudian dalam kurung waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015. Dapat dilihat rinciannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Laporan/Kasus Yang Masuk di Kantor Kepolisian Resort Bone
Mulai Tahun Januari 2012 – Desember 2015

No	Tahun	Jumlah Laporan/Kasus
1	2012	2
2	2013	8
3	2014	1
4	2015	3
Jumlah		14 Kasus

Sumber Data : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bone (Bone, 22 Februari 2016)

Dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di Polres Kabupaten Bone mulai tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah sebanyak 14 kasus. Tahun 2012 hingga tahun 2013 kasus perjudian sabung ayam mengalami peningkatan, yaitu dari 2 kasus pada tahun 2012 menjadi 8 kasus pada tahun 2013. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2014 dengan jumlah kasus sebanyak 1 kasus, kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 3.

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel tersebut di atas, jelas terlihat bahwa kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Bone mengalami pasang surut. Meskipun demikian, angka-angka tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah tersebut.

Dengan melihat tabel tersebut di atas, Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Bonelumayan tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum.

Tabel 4.3

Data Penyelesaian Kasus Perjudian Sabung Ayam Tahun 2012 sampai Tahun 2016

No	Tahun	Perjudian Sabung Ayam	
		Jumlah Kasus/Laporan	Penyelesaian Kasus (P21)
1	2012	2	2
2	2013	8	3
3	2014	1	1
4	2015	3	1
5	2016	1	
Jumlah		15	7

Sumber: Polres Bone 2016

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Bone mengalami peningkatan namun dalam hal penyelesaian kasus terjadi perkembangan yang tak menentu bahkan terjadi penurunan jumlah penyelesaian kasus. Dengan jumlah kasus perjudian sabung ayam sebanyak 15 kasus dan hanya 7 kasus yang diselesaikan (dilimpahkan ke Kejaksaan) Berkas tersebut tidak dilimpahkan karena tidak cukup bukti.

Tabel 4.4

Data pelaku Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polres Bone menurut pekerjaan, Tahun 2012 sampai Tahun 2016

No	Tahun	Pekerjaan				Jumlah
		Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Wiraswasta	
1	2012	2	1	-	2	5
2	2013	11	2	-	1	14
3	2014	-	2	-	1	3
4	2015	2	3	-	-	5
5	2016	-	-	3	1	4
Jumlah		15	8	3	5	31

Sumber: Polres Bone 2016

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa yang paling banyak melakukan perjudian sabung ayam adalah tidak bekerja (pengangguran). Dengan jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh golongan tidak bekerja (pengangguran) sebanyak 15 orang, Jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh golongan petani sebanyak 8 orang, jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh golongan nelayan sebanyak 3 orang, dan jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh golongan wiraswasta sebanyak 5 orang.

Tabel 4.5

Data pelaku Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polres Bone menurut pendidikan, Tahun 2012 sampai Tahun 2016

No	Tahun	Pendidikan					Jumlah
		Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
1	2012	3	2	-	-	-	5
2	2013	5	8	1	-	-	14
3	2014	3		-	-	-	3
4	2015	-	5	-	-	-	5
5	2016	-	4	-	-	-	4
Jumlah		11	19	1	-	-	31

Sumber: Polres Bone 2016

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa yang paling banyak melakukan perjudian sabung ayam adalah pelaku yang berijazah SD. Jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang tidak sekolah sebanyak 11 orang, jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang berijazah SD sebanyak 19 orang, dan jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang berijazah SMP sebanyak 1 orang.

Di samping melihat data- data diatas, Peneliti juga menemukan fakta-fakta bahwa pelaku perjudian juga sangat rawan melakukan tindak kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap pelaku perjudian sabung ayam lainnya disebabkan karena kalah dalam perjudian sabung ayam tersebut. Peneliti juga menemukan fakta bahwa pelaku perjudian bukan hanya masyarakat biasa tetapi juga ada oknum polisi dan yang juga terlibat dalam perjudian sabung ayam tersebut sehingga banyak kasus perjudian sabung ayam selesai di tempat kejadian perkara.

B. Pembahasan

1. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Di Kabupaten Bone

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian sabung ayam merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

Sebelum membahas tentang bagaimana upaya penindakan dan penanggulangan dari kejahatan perjudian sabung ayam maka terlebih dahulu Peneliti akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga

terjadi kejahatan perjudian sabung ayam dengan hasil analisa dan pengamatan Peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan di instansi terkait dan relalita yang Peneliti temukan di lapangan/tengah - tengah masyarakat sebagai berikut:

a. Faktor Kebiasaan/*Hobby*

Berdasarkan hasil wawancara oleh Banit Resum Reskrim Polres Bone Brigpol Indra Ahmad Samsuri, S.H.(wawancara tanggal 1 Maret 2016) bahwa:

“Banyak Pelaku yang melakukan kejahatan perjudian sabung ayam karena faktor kebiasaan. Dan menurut keterangan pelaku hal tersebut untuk menghilangkan rasa bosan dan penat sehabis bekerja. Dan juga biasanya kegiatan judi sabung ayam banyak terjadi pada bulan puasa karena dijadikan sebagai kegiatan *ngabuburit* untuk menunggu waktu buka puasa”.

Hal di atas, senada dengan apa yang dikemukakan oleh Reno pelaku perjudian sabung ayam (wawancara, tanggal 28April 2016), menurut Reno bahwa,

“saya melakukan perjudian hanya karena ingin menghilangkan kebosanan dan kepenantan setelah bekerja, bukan karena ingin menjadikan judi sebagai sumber penghasilan”

Faktor kebiasaan, ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan perjudian serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetapi tetap saja mereka melakukan perjudian karena kegemarannya untuk melakukan perjudian.

Kebiasaan anggota masyarakat inilah yang harus dihilangkan. Anggota masyarakat seharusnya mencari kegiatan lain yang bermanfaat untuk membunuh rasa bosan serta penat sehabis bekerja, bukannya melakukan perjudian sabung ayam yang merugikan.

b. Faktor Pendidikan

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas, bahwa faktor pendidikan juga menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Faktor pendidikan sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.

Penulis mencantumkan pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone, karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

Peranan pendidikan agama dan pendidikan hukum adalah sangat penting dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan agama dan hukum yang efektif, tidak hanya diharapkan

terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya lingkungan sosial yang sehat.

Menurut Kanit Resum Reskrim Polres Bone Ipda Samsul Rijal (wawancara tanggal 25 Februari 2016):

“Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut seseorang menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan, khususnya perjudian sabung ayam. Sebab orang tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga hanya mengikuti hawa nafsu untuk terus berjudi. Dalam hal ini perjudian sabung ayam.”

c. Faktor Lingkungan

Menurut Ipda Samsul Rijal (wawancara tanggal 25 Februari):

“Mereka yang awalnya sering melihat teman-teman mereka berjudi sabung ayam, lambat laun akan timbul keinginan untuk mencoba, dan pada akhirnya lingkungan tersebutlah yang memberi kesempatan kepada seseorang melakukan kejahatan perjudian sabung ayam.”

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut " *Zoon Politikon* ", yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan, begitu pun sebaliknya apabila seseorang tersebut yang merupakan pelaku kejahatan tetapi bergaul dengan orang baik, maka cepat atau lambat

orang tersebut akan berubah menjadi lebih baik pula. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter, oleh karena nilai-nilai di sekeliling tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bonger:

Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Sekalipun kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan kehidupannya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup. Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Hal demikian di sebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.³¹

Kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negatif. Dan setelah seseorang mencoba melakukan perjudian sabung ayam, seseorang tersebut akan kecanduan lagi untuk mengulangi perbuatan tersebut dan

³¹Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 101.

akan begitu seterusnya sehingga lingkungan disebut memberi pengaruh yang besar dalam menyebabkan terjadinya perjudian sabung ayam.

d. Faktor Ekonomi

Menurut Kasubnit II Unit I Resum Reskrim Polres Bone, Brigpol

Andi Tirmansyah Bandaso (wawancara tanggal 1 Maret 2016)

bahwa:

“Seseorang melakukan perjudian sabung ayam salah satu penyebabnya yaitu kemiskinan. Dan dengan semakin banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga sebagian besar masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan, dalam hal ini judi sabung ayam tanpa memikirkan resiko yang menantinya, karena mereka berpikir dengan berjudi mereka bisa mendapatkan uang lebih cepat. Dan rata-rata orang yang melakukan judi sabung ayam adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap.”

Selanjutnya Basri, pelaku kejahatan perjudian sabung ayam (wawancara 28 April 2016), mengemukakan bahwa :

“Saya berjudi karena keadaan. Pekerjaan sebagai nelayan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya.”

Mansuwing, pelaku kejahatan perjudian sabung ayam (wawancara 28 April 2016), mengemukakan bahwa :

“Sayamenjadikan judi sabung ayam sebagai solusi mencari uang dalam waktu yang singkat.”

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya perjudian, karena seseorang menganggap bahwa berjudi memiliki keuntungan yang lebih besar.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini di karena kan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak.

Perjudian sabung ayam menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, perjudian sabung ayam dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat, baik ekonomi menengah keatas, maupun ekonomi lemah untuk mencari uang dengan lebih mudah. Pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone sebagian dari mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang lemah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperoleh.

e. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian di Kabupaten Bone tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Bone kebanyakan selesai di tempat kejadian perkara. Seperti yang dikemukakan oleh Ipda Samsul Rijal (wawancara tanggal 25 Februari 2016):

“Banyak kasus perjudian sabung ayam selesai di tempat perkara serta apabila ada kasus yang lanjut sampai pengadilan, putusan hakim

dalam menjatuhkan vonis masih rendah kepada para pelaku kejahatan perjudian sabung ayam sehingga tidak memberikan efek jera.”

Perjudian sabung ayam merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh hukum positif (KUHP), pelaksanaan judi sabung ayam di Bone dikatakan melanggar hukum pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan suatu kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal ini juga menjelaskan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung-untungan pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selain melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP juga melanggar ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang disamakan dengan ketentuan Pasal 303 bis KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Ketentuan ini unsur yang terpenuhi sehingga dikatakan suatu tindak pidana yaitu:

1. Barang siapa
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum
3. Kecuali ada izin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan judi tersebut.

Dari uraian tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa pelaksanaan kejahatan perjudian melalui sarana sabung ayam merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan juga dalam pelaksanaannya tidak memperoleh izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu. Namun tetap saja ada oknum-oknum tertentu di dalam wilayah hukum Polres Bone yang tetap melakukan perjudian sabung ayam meskipun mereka sudah tahu bahwa hal tersebut dilarang dan melanggar hukum yang berlaku di negara ini dan akan dikenakan sanksi dan atau hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Di Kabupaten Bone

Usaha penanggulangan suatu kejahatan perjudian sabung ayam, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif.

Di bawah ini Penulis akan menguraikan upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Kabupaten Bone berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Penulis selama melakukan penelitian.

a. Tindakan Preventif

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam adalah melalui cara *preventif* atau sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya *preventif* dalam hal penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone menurut Iptu Samsul Rijal (Wawancara 25 Februari 2016) bahwa:

“Dalam rangka menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam itu harus dimulai dari individu, masyarakat dan terutamakepolisian”.

1. Individu.

Unsur yang paling pertama yang berperan penting dalam penanggulangan kejahatan perjudian adalah individu. Setiap individu, dalam hal ini para anggota masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun kesadaran dari segi hukum bahwa perjudian sabung ayam hanya akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan mereka. Sehingga individu tersebut tidak akan berani mencoba untuk melakukan kejahatan, khususnya perjudian sabung ayam karena hanya akan memberikan dampak negatif bagi dirinya sendiri. Karena apabila kesadaran dalam diri idividu itu tidak ada ia akan melakukan kejahatan, khususnya perjudian sabung ayam, dan hal itu bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya sehingga hal tersebut tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga lingkungan di sekitarnya, utamanya keluarga dari si pelaku kejahatan perjudian sabung ayam tersebut.

2. Masyarakat.

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda satu sama lainnya, sehingga kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu hal yang sangat urgen yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam

kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan.

Menurut hemat penulis masyarakat kabupaten Bone haruslah sadar bahwa mereka adalah bagian terpenting yang dapat menentukan tinggi rendahnya kejahatan perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Bone, dan dengan kesadaran itu maka secara tidak langsung masyarakat akan merasa bertanggung jawab dalam memberantas kejahatan perjudian sabung ayam tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam lebih baik dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dan dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan tepat untuk melakukan upaya tersebut. Misalkan dengan cara menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram, saling menghargai dan mematuhi norma-norma yang ada serta saling menumbuhkan dan menjaga hubungan silaturahmi. Selain itu, juga dapat melaporkan jika mengetahui bahwa di lingkungan sekitar tempat tinggalnya terjadi kejahatan perjudian sabung ayam.

3. Kepolisian.

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari perjudian dan akibat yang terjadi dalam

masyarakat. Pihak kepolisian, dalam rangka upaya pencegahan kejahatan, maka pihak kepolisian melakukan tindakan-tindakan, yang antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat perjudian sabung ayam secara sosial dan secara hukum, harus dilakukan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu menurut Iptu Samsul Rijal (Wawancara 25 Februari 2016) bahwa:

“Dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana perjudian sabung ayam, aparat kepolisian melakukan patroli dan pengawasan di setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya perjudian sabung ayam secara kontinyu”

Selain hal di atas, operasi atau razia yang berkesinambungan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat harus dilakukan. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan perjudian sabung ayam tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.

b. Tindakan Refresif

Menurut Iptu Samsul Rijal (Wawancara 25 Februari 2016) bahwa:

“Polisi melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam, diantaranya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penahanan terhadap pelaku, dan selanjutnya mengajukan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)”.

Selain tindakan pencegahan sebelum kejahatan perjudian sabung ayam terjadi, tindakan berikutnya yang dapat dilakukan adalah tindakan *represif* atau tindakan yang dilakukan setelah kejahatan perjudian sabung ayam terjadi. Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Bone dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone antara lain adalah :

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

Selain dari kepolisian menurut Penulis, bahwa pihak kejaksaan dan hakim juga mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penulis berpendapat bahwa kejaksaan harus betul-betul berkomitmen untuk memberantas kejahatan dengan meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara dalam hal di muka persidangan, menurut hemat Penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai pendidikan yang dapat mengubah sikap dan mental pelaku yang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Hukuman juga dapat berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku supaya pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi kembali tindakannya. Dan merupakan sarana pendidikan bagi pelaku sehingga kelak pelaku akan menyadari hakikat penghukuman yang dijatuhkan kepada dirinya, dan pelaku akan menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Berdasarkan pembahasan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut senada dengan metode yang disampaikan oleh Walter C. Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

6. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana;
7. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
8. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;

9. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
10. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.³²

³² Abintoro Prakoso, Op.cit, hlm.171

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam dalam wilayah hukum Polres Bone, meliputi: a) Faktor kebiasaan, b) Faktor pendidikan, c) Faktor lingkungan, d) Faktor ekonomi, e) Faktor lemahnya penegakan hukum
- a) Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang di wilayah hukum Polres Bone, berdasarkan hasil penelitian, adalah sebagai berikut :
 - a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah 1) individu, dengan cara menumbuhkan kesadaran dalam diri, baik kesadaran dari segi agama maupun kesadaran dari segi hukum bahwa perjudian sabung ayam hanya akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan mereka. 2) masyarakat, dengan cara menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram, saling menghargai dan mematuhi norma-norma yang ada serta saling menumbuhkan dan menjaga hubungan silaturahmi. dan 3) kepolisian dalam rangka upaya pencegahan kejahatan, maka pihak

kepolisian melakukan tindakan-tindakan, yang antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat perjudian sabung ayam secara sosial dan secara hukum, dan melakukan operasi atau razia yang berkesinambungan

- b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Bone dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone antara lain adalah : 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan. 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

B. Implikasi

Hasil Penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain:

1. Implikasi terhadap Pemerintah, diupayakan untuk tetap memberikan anggaran terhadap Kepolisian Resort Bone untuk menunjang program-programnya agar Polres Bone dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik selama ini, selain itu diharapkan kontribusi pemerintah untuk tetap mengawasi dan memantau kinerja Polres Bone
2. Implikasi terhadap Polres Bone yakni diupayakan tetap melakukan patroli dan razia di tempat-tempat yang rawan terjadinya perjudian sabung ayam agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian sabung

ayam, selain itu diupayakan Polres Bone tetap bekerja sama dengan baik terhadap instansi yang terkait agar dalam menjalankan tugas-tugasnya berjalan dengan lancar.

3. Implikasi terhadap Masyarakat yakni agar masyarakat dapat menumbuhkan rasa kesadaran mengenai hukum atau aturan yang berlaku.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian sabung ayam selain dilakukan oleh kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat persuasif yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, dan apabila masyarakat mengetahui adanya perjudian sabung ayam yang terjadi agar kiranya melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakan hukum yang baik.
3. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi terhadap kejahatan perjudian sabung ayam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013.*Kriminologi & Hukum Pidana*.Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Indah Sri Utari. 2012.*Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.
- Kartini Kartono. 1994.*Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung:Mandar Maju.
- _____. 2014. *Patologi Sosial*.Jakarta: Rajawali Pers.
- _____.2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2008.*Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso. 2003.*The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013.*Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2010.*Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Anonim

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 1989.
- Buku Luks Edisi Eksklusif KUHP dan KUHAP, 2013. Yogyakarta: Harmoni.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- <http://artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan-hukum-tentang-judi/>
- http://phesolo.wordpress.com/2011/12/02sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar-permainan-semata/?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C2433095604